

KONSEP PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH KEL. SEPANJANG JAYA, KEC. RAWA LUMBU, KOTA BEKASI

Wiyoga Triharto
Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta
wiyogatriharto@yahoo.com

Abstract

The problem of slum settlements in Indonesia is still the main problem faced in residential areas in cities and districts. The problem of slum settlements is the main issue in Bekasi City, which is quite a polemic with urban problems, high levels of density and heterogeneous activity functions. The purpose of the study was to identify the condition of the slum area of Bekasi City in the Panjang Jaya Village, Rawa Lumbu District to get a concept of improving the quality of handling slum settlements, by analyzing the infrastructure service needs of the slum area and the conditions of settlements in the slum area. The research methodology uses qualitative descriptive methods through primary and secondary data collection by survey and interview methods. To obtain in-depth data and examine slum settlements, this research uses a normative, participatory and facilitative approach.

Keywords: *concept, improvement of handling quality, slum settlement.*

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Undang-Undang tersebut juga menyatakan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Seluruh aspek di atas melibatkan banyak institusi, lembaga serta masyarakat agar proses penyelenggaraannya sesuai standar untuk mencapai tujuan dan manfaat. Bank Dunia memprediksi sebanyak 68 % dari populasi Indonesia bakal memadati wilayah perkotaan pada 2025 jika gelombang urbanisasi tidak bisa dikendalikan melalui pembangunan yang merata. (www.cnnindonesia.com-CNN Indonesia, Senin, 26/01/2015). Kawasan permukiman mendominasi kawasan perkotaan yang membangkitkan kegiatan dan terus mengikuti, bahkan mengarahkan pengembangan kawasan lainnya dan akan mempengaruhi arah pengembangan kota yang

bersangkutan. Setiap kawasan fungsional yang dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang beraktivitas di dalam kawasan yang tersebut [1].

Pertumbuhan kawasan permukiman dapat dikelompokkan sebagai kawasan yang direncanakan dan tertata dengan baik, serta kawasan permukiman yang merupakan cikal bakal tumbuhnya kawasan perkotaan dan terus berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya. Berkenaan dengan kedua jenis tersebut, dalam suatu wilayah atau kota, perkembangan dari kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan yang tidak terkendali dan menyebabkan munculnya permukiman kumuh. Seringkali, berdampak lebih lanjut pada meningkatnya kesenjangan masyarakat serta angka kriminalitas, dan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat [2].

Sebagian besar pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada saat ini kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan. Hal ini akan menimbulkan beberapa implikasi permasalahan, antara lain: (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan,

dan (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, (c) tidak terkendalinya pembangunan permukiman pada daerah-daerah non-permukiman, dan (d) terjadinya permukiman kumuh [3].

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini sekarang berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar keempat di Indonesia. Saat ini, Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri juga dijuluki sebagai kota patriot dan kota pejuang. Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu'min sebagai Residen Militer Daerah V. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "SWATANTRA WIBAWA MUKTI".

Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi. Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang

seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.

Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982. Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996. Kota Bekasi mulai terbentuk sejak tahun 1997. Pada awalnya tahun 2001 sampai 2004 Kota Bekasi terbagi dalam 10 Kecamatan dan 52 kelurahan, akan tetapi pada tahun 2005 sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan dan kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan dengan luas secara keseluruhan sekitar 210,49 km². Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kota Bekasi yaitu Kecamatan Mustika Jaya atau sekitar 11,75% dari luas keseluruhan Kota Bekasi [4].

Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terendah adalah kecamatan Bekasi Timur dengan luas wilayah 1.349 km² atau sekitar 6,41% dari luas keseluruhan Kota Bekasi. Secara Administratif, Kota Bekasi berbatasan dengan beberapa wilayah administratif lainnya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Barat dengan Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Bekasi

Nama-nama kecamatan, luas wilayah, dan jumlah kelurahan di Kota Bekasi tahun 2014, Lihat Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Nama Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jumlah Kelurahan Kota Bekasi Tahun 2019

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Kelurahan
Pondokgede	16,29	5
Jatisampurna	14,49	5
Pondokmelati	18,57	4
Jatiasih	22,00	6
Bantargebang	17,04	4
Mustikajaya	24,73	4
Bekasi Timur	13,49	4
Rawalumbu	15,67	4
Bekasi Selatan	14,96	5
Bekasi Barat	18,89	5
Medansatria	14,71	4
Bekasi utara	19,65	6
Kota Bekasi	210,49	56

Sumber: KDA Kota Bekasi, Tahun 2019

Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan, dan sisanya untuk bangunan lainnya. Secara umum perkembangan permukiman Kota mengarah pada terbentuknya kawasan-kawasan permukiman baru berskala besar yang dikembangkan oleh pengembang swasta, terutama di daerah Bantargebang dan Jatisampurna, dan di kawasan sebelah Utara Kota Bekasi.

Permukiman yang dibangun secara individu tersebar merata di seluruh kecamatan. Permukiman di Bekasi bagian selatan merupakan permukiman dengan kepadatan yang masih rendah. Secara umum, profil dan sebaran kawasan permukiman di Kota Bekasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Permukiman dengan kepadatan tinggi, banyak ditemui Kecamatan Pondokgede, Pondok Melati, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur dan Kecamatan Rawalumbu.
- Permukiman dengan kepadatan sedang, berkembang di Kecamatan Bekasi Utara,

Medansatria, Jatisampurna, dan Kecamatan Jatiasih.

- Permukiman dengan kepadatan rendah banyak ditemukan di sekitar Kecamatan Bantargebang, Mustikajaya serta sebagian Kecamatan Jatiasih.

Berdasarkan data permukiman yang dibangun secara individu diatas, Kecamatan Rawalumbu termasuk Kecamatan permukiman dengan kepadatan tinggi salah satunya Kelurahan Sepanjang Jaya, dengan kondisi demikian area Kelurahan Sepanjang Jaya memiliki permasalahan yaitu daerah kumuh yang perlu dilakukan perbaikan, maka perlu dilakukan studi secara konprehensif dan memverifikasi kondisi eksisting daerah tersebut guna mendapatkan satu konsep perbaikan yaitu konsep peningkatan kualitas penanganan permukiman kumuh pada daerah tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan yang mendasar dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang ada, diantaranya yaitu untuk mengetahui persoalan kekumuhan pada wilayah tersebut, mengetahui bagaimana solusi pemecahannya, serta memberi solusi konsep peningkatan kualitas penanganan

permukiman kumuh pada lokasi tersebut.

2. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang mencari data penelitian yang tidak dapat dijelaskan dengan angka-angka dan terukur. Kualitas data akan ditentukan berdasarkan informasi dari pengetahuan subjek [5]. Penelitian kualitatif ini menggunakan data primer dari studiPustaka sebagai data utama dan observasi. Keduanya digunakan sebagai bahan untuk dianalisis. Untuk mendapatkan data mendalam dan mengkaji permukiman kumuh, maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, partisipatif dan fasilitatif.

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh sering kali tidak terstruktur dan relative banyak, sehingga memungkinkan peneliti untuk menata, mengkritisi, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh [6]. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik interaktif dimana ada kemungkinan terjadi saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber datanya. Teknik interaktif meliputi observasi dan wawancara [7]. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif yang diusung oleh Huberman dan Miles. Model interaktif tersebut melibatkan empat komponen, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi [8]. Reduksi data ini bertujuan untuk mengerucutkan kumpulan data yang didapat sehingga mendapatkan data-data utama yang akan disajikan dan diteruskan dalam analisis [9].

3. Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah Kota Bekasi

Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang

melewati kota ini. Kota ini merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kota Bekasi juga dijuluki sebagai Kota Patriot dan Kota Pejuang.

Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai Ibu kota Kerajaan Tarumanagara (358-669). Luas Kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, leatak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibukota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M) Raja Kerajaan Sunda (disebut pula Kerajaan Pajajaran) yang terakhir.

Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Diantaranya dengan ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482-1521 M) yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke 5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanagara abad ke 8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke 14, Bekasi menjadi wilayahkekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).

Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari jaman ke jaman, sejak jaman Hindia

Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan dan jaman Republik Indonesia. Di jaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (*District*), termasuk Regenschap (Kabupaten) *Meester Cornelis*. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih di kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina.

Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. *Regenschap Meester Cornelis* menjadi KEN Jatinegara dengan wilayah meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan RI (17 Agustus 1945), struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa/Kelurahan. Saat itu Ibu Kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede).

Pada waktu itu, Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi Kewedanaan. Kewedanaan Bekasi masuk dalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Kerawang, sedangkan sebelah Barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No. 178 NegaraPasundan.

Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu'min sebagai Residen

Militer Daerah V. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "SWATANTRA WIBAWA MUKTI".

Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (Jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi. Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.

Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982. Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996.

B. Profil Makro

Luas Kelurahan Sepanjang jaya : 294,25 Ha, Jumlah Penduduk Tahun 2019 : 30,881 Jiwa, Jumlah Kepala Keluarga : 10,574, Sarana Kesehatan terdapat RSU swasta, Rumah Sakit Bersalin dan 1 Puskesmas, Sarana pendidikan sudah memadai dari TK dengan Universitas.

Tingkat Keluarga Kelurga Pra Sejahtera : 124 KK, Keluarga Pra Sejahtera I : 1,100 KK

Tabel 2. Identifikasi Kelurahan Sepanjang Jaya Berdasarkan Rw

RW	PERMASALAHAN	AKIBAT	POTENSI	PENGEMBANGAN
001	<ul style="list-style-type: none"> Peremukian yang cukup padat Jarak antar rumah dengan lebar rata-rata 1.5 meter Saluran drainase yang terputus Akses air minum memanfaatkan air tanah Minimnya lahan untuk ruang public Belum terdapat sarana dan prasarana persampahan Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Peremukian yang padat membuat rawan kebakaran Tidak ada RTH membuat warga berkumpul di depan rumah atau gang Sampah yang menumpuk di lahan kosong 	<ul style="list-style-type: none"> Warga RW 01 memiliki kepedulian terhadap lingkungan cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Membuat Gapura
002	<ul style="list-style-type: none"> Saluran drainase yang terputus Akses air minum memanfaatkan air tanah Sebagian Kondisi Jalan rusak Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Peremukian yang padat membuat rawan kebakaran Sering terjadi genangan 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Perbaikan jalan
003	<ul style="list-style-type: none"> Peremukian yang cukup padat Jarak antar rumah dengan lebar rata-rata 1 meter Saluran drainase yang terputus Pemanfaatan bersama saluran drainase dan saluran limbah yang belum diolah Sebagian kondisi jalan rusak Rusaknya MCK Akses air minum memanfaatkan air tanah Minimnya lahan untuk ruang public Belum terdapat sarana dan prasarana persampahan Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Peremukian yang padat membuat rawan kebakaran Tidak ada RTH membuat warga berkumpul di depan rumah atau gang Sering terjadi genangan Munculnya bau tidak sedap di saluran drainase Sampah yang menumpuk di lahan kosong 	<ul style="list-style-type: none"> Warga berantusias dengan adanya rencana penataan lingkungan Tingkat partisipasi warga cukup tinggi Potensi lahan dengan luas 30 m² yang telah di hibahkan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Perbaikan Jalan Peningkatan Drainase Pengadaan Baklor Pembuatan IPAL komunal Penyediaan RTH publik
004	<ul style="list-style-type: none"> Peremukian yang cukup padat Jarak antar rumah dengan lebar rata-rata 1 meter Berada pada sekitar Sungai Bekasi Saluran drainase yang terputus Pemanfaatan bersama saluran drainase dan saluran limbah yang belum diolah Sebagian kondisi jalan rusak Sering terjadi genangan Rusaknya MCK Akses air minum memanfaatkan air tanah Minimnya lahan untuk ruang public Belum terdapat sarana dan prasarana persampahan Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Peremukian yang padat membuat rawan kebakaran Tidak ada RTH membuat warga berkumpul di depan rumah atau gang Sering terjadi genangan Munculnya bau tidak sedap di saluran drainase Sampah yang menumpuk di lahan kosong 	<ul style="list-style-type: none"> Warga berantusias dengan adanya rencana penataan lingkungan Tingkat partisipasi warga cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Perbaikan Jalan Peningkatan Drainase
005	<ul style="list-style-type: none"> Peremukian yang cukup padat Jarak antar rumah dengan lebar rata-rata 1.5 meter Saluran drainase yang terputus Akses air minum memanfaatkan air tanah Minimnya lahan untuk ruang public Belum terdapat sarana dan prasarana persampahan Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Peremukian yang padat membuat rawan kebakaran Tidak ada RTH membuat warga berkumpul di depan rumah atau gang Sering terjadi genangan Sampah yang menumpuk di lahan kosong 	<ul style="list-style-type: none"> Warga RW 05 memiliki kepedulian terhadap lingkungan cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Membuat Gapura Perbaikan Jalan

RW	PERMASALAHAN	AKIBAT	POTENSI	PENGEMBANGAN
006	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat prasarana persampahan Tidak terdapat sarana & prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pembuangan sampah secara individu Sulitnya mendapatkan sumber air jika terjadi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga cukup tinggi Daerah permukiman di RW 06 berpotensi untuk peningkatan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Membuat Gapura Perbaikan dinding kali
007	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat sarana dan prasarana persampahan Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pembuangan sampah secara individu Sulitnya mendapatkan sumber air jika terjadi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga cukup tinggi Daerah permukiman di RW 07 berpotensi untuk peningkatan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Perbaikan trotoar Peningkatan Drainase
008	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat sarana dan prasarana persampahan Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pembuangan sampah secara individu Sulitnya mendapatkan sumber air jika terjadi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga cukup tinggi Daerah permukiman di RW 08 berpotensi untuk peningkatan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Peningkatan Turap dan Normalisasi Saluran
009	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat sarana dan prasarana persampahan Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pembuangan sampah secara individu Sulitnya mendapatkan sumber air jika terjadi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga cukup tinggi Daerah permukiman di RW 09 berpotensi untuk peningkatan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Dengarukon kali
010	<ul style="list-style-type: none"> Saluran drainase yang terputus Minimnya lahan untuk ruang public Belum terdapat sarana dan prasarana persampahan Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada RTH membuat warga berkumpul di depan rumah atau gang Sering terjadi genangan Sampah yang menumpuk di lahan kosong 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Drainase Pengadaan Bakter
011	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat sarana dan prasarana persampahan Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pembuangan sampah secara individu Sulitnya mendapatkan sumber air jika terjadi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga cukup tinggi Daerah permukiman di RW 011 berpotensi untuk peningkatan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Perbaikan jalan
012	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya lahan untuk ruang public Belum terdapat sarana dan prasarana persampahan Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada RTH membuat warga berkumpul di depan rumah atau gang Sistem pembuangan sampah secara individu Sulitnya mendapatkan sumber air jika terjadi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Pengadaan Bakter
013	<ul style="list-style-type: none"> Saluran drainase yang terputus Akses air minum memanfaatkan air tanah Tidak terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Sering terjadi genangan Sulitnya mendapatkan sumber air jika terjadi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga cukup tinggi Daerah permukiman di RW 013 berpotensi untuk peningkatan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuatkan jalur air hydran kebakaran Pengadaan Bakter

Tabel 3. Verifikasi Lokasi dan Pematihan Profil Permukiman Kumuh

No	Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai	KELURAHAN SEPANJANG JAYA																			
					RW 01	RW 02	RW 03	RW 04	RW 05	RW 06	RW 07	RW 08	RW 09	RW 10	RW 11	RW 12	RW 13							
A					Identifikasi Kondisi Permukiman (Tipe)																			
1	Kondisi bangunan gedung	Ketidakteraturan bangunan	76 %-100% bangunan ada lokasi tidak memiliki keteraturan	5				5	5															
			51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3			3			3	3													
			25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	1											1	1	1	1	1	1			
		Tingkat kepadatan bangunan	76 %-100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5					5															
			51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	3			3			3													
			25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1											1	1	1	1	1	1	1			
Kebidaksuaian dengan persyaratan teknis	76 %-100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5					5	5																
	51%-75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	3			3							1	1	1	1	1	1	1					
	25%-50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1											1	1	1	1	1	1	1					
2	Kondisi jalan lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	76 %-100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5																				
			51%-75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3				3	3															
			25%-50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1																				
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	76 %-100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5																				
			51%-75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3				3	3															
			25%-50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	1																			
3	Kondisi penyediaan air minum	Ketersediaan akses aman air minum	76 %-100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5																				
			51%-75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3																				
			25%-50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	76 %-100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5																				
			51%-75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3				3	3															
			25%-50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	1			1	1															
4	Kondisi drainase lingkungan	Kedidakmampuan mengalirkan limpasan air	76 %-100% area terjadi genangan > 30 cm, > 2jam, dan > 2x setahun	5					5	5														
			51%-75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2jam, dan > 2x setahun	3	3			3																
			25%-50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2jam, dan > 2x setahun	1																				
		Ketidakterseediaan drainase	76 %-100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5																				
			51%-75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3					3	3														
			25%-50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1	1			1	1															
		Kebidak terhubungan dengan sistem drainase perkotaan	76 %-100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki atasnya	5						5	5													
			51%-75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki atasnya	3	3			3			3	3												
			25%-50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki atasnya	1																				
		Tidak terpeliharanya drainase	76 %-100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5																				
			51%-75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	3			3			3	3												
			25%-50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1																				
Kualitas konstruksi drainase	76 %-100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5							5	5														
	51%-75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	3			3																		
	25%-50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1																						
5	Kondisi pengelolaan air limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	76 %-100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5						5	5													
			51%-75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	3			3																
			25%-50 area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1																				
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	76 %-100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5																				
			51%-75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	3			3																
			25%-50 area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1																				
6	Kondisi Prasarana dan	76 %-100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi	5						5	5														

No	Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai	KELURAHAN SEPANJANG JAYA																				
					RW 01	RW 02	RW 03	RW 04	RW 05	RW 06	RW 07	RW 08	RW 09	RW 10	RW 11	RW 12	RW 13								
6	pengelolaan persampahan	sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	persyaratan teknis																						
			51%-75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	3	3				3	3	3	3												
			25%-50 area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1																					
			Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	76 %-100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5						5	5													
				51%-75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	3			3				3	3	3	3									
				25%-50 area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1																				
		Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	76 %-100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5																					
			51%-75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3	3			3				3	3	3	3										
			25%-50 area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1																					
		7	Kondisi proteksi kebakaran	Ketersediaan prasarana proteksi kebakaran	76 %-100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5																			
					51%-75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	3			3				3	3	3	3								
					25%-50 area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1																			
Ketersediaan sarana proteksi kebakaran	76 %-100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran			5																					
	51%-75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran			3	3			3					3	3	3	3									
	25%-50 area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran			1																					
Sub Total					44	48	79	85	48	42	51	38	18	18	18	18	18	18	18	18	18				
8	Perimbangan lain	Nilai strategis lokasi	Lokasi terletak pada fungsi strategis kota	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
			Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kota	1																					
			Untuk metropolis kota besar : • Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 400 jiwa/ha	5																					
		Kependudukan	Untuk kota sedang dan kota kecil : • Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 200 jiwa/ha	3																					
			• Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151-200 jiwa/ha	3	3			3				3													
			• Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar < 151 jiwa/ha	1																					
Kondisi sosial, ekonomi dan budaya	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5																							
	Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	1	1			1																			
	Sub Total					9	9	13	15	9	11	11	11	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
9	Legalitas lahan	Kejelasan status penguasaan lahan	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)			
			Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)																					
		Kesesuaian RTR	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		
			Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)																					

Konsep

KONSEP DRAINASE



Gambar 1.
Gambar Konsep Drainase
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

KONSEP PENGEMBANGAN SANITASI (AIR LIMBAH)

SUBRESERVOAR

subreservoir untuk memenuhi kebutuhan air dalam gedung tersebut. Metode yang digunakan adalah zero run off (menyerap air tanpa mengalirkan ke area lain). Subreservoir sendiri adalah salah satu teknologi drainase permukiman ramah lingkungan yang berfungsi sebagai penampung air hujan untuk air baku dan resapan air. Membantu penyediaan pasokan air terutama pada musim kemarau. Mereduksi genangan air hujan (banjir) di permukiman hingga 48%. Mendukung pelestarian air tanah (konservasi air tanah) dan manajemen air hujan di lingkungan permukiman



BIOROTASI

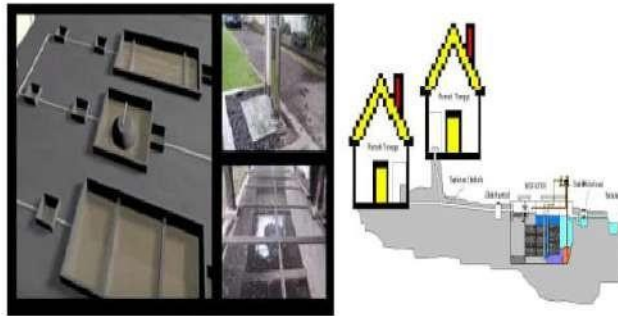
Biorotasi adalah instalasi pengolahan air limbah rumah tangga (non kakus) yang terdiri dari sistem biofilter dan taman sanita dengan re-sirkulasi yang dapat menghasilkan air olahan yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan



Gambar 2
Gambar Subresevoir & Biorotasi
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

BIOTOUR

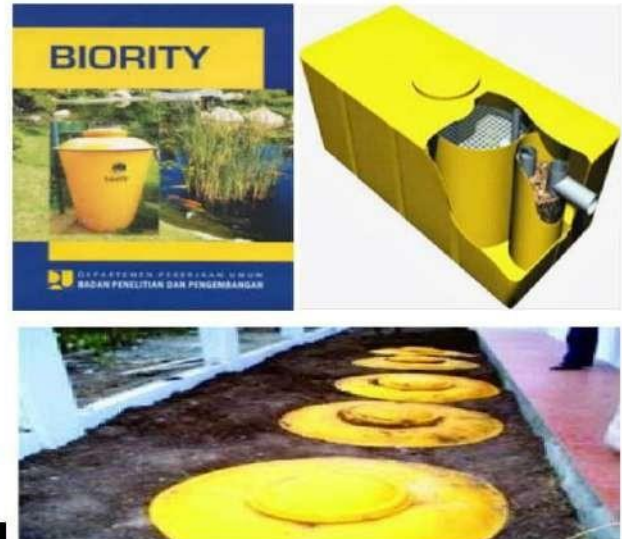
Biotour fasilitas pengolahan air limbah Bio-Filter atau Biotour merupakan rangkaian unit pengolahan air limbah rumah tangga untuk menghasilkan air daur ulang dengan kualitas baik untuk kebutuhan rumah tangga. Air limbah rumah tangga yang akan diolah dikumpulkan dari beberapa rumah dengan cara mengalirkannya melalui pipa PVC. Jenis air limbah yang diolah yakni seluruh air limbah rumah tangga yang berasal dari air bekas cucian, buangan dapur, buangan kamar mandi dan buangan (limbah) tinia.



BIORITY (BIOLOGICALLY PURITY)

Keunggulan dari Biority, di antaranya:

- 1) Tanpa memerlukan resapan dan ramah lingkungan
- 2) Pemasangan mudah dan cepat
- 3) Hemat ruang
- 4) Material yang tahan korosi
- 5) Air buangan yang dapat langsung dialirkan ke drainase umum.



Gambar 3

Gambar Biotour & Biority

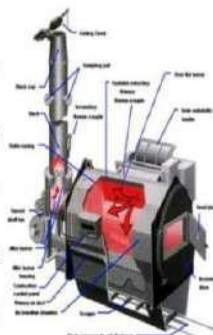
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM PERSAMPAHAN

PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN PEMBAKARAN (INCINERATOR MINI)

Salah satu metoda alternatif penanganan pengelolaan sampah dengan skala kecil dapat diterapkan di tingkat RT/ RW, Kelurahan dan Kecamatan dengan pola pembakaran berteknologi (Incinerator Mini). Keuntungan dari incinerator mini ini adalah :

- ✓ tidak diperlukan lahan besar,
- ✓ mudah dalam pengoperasian,
- ✓ hemat energi (minyak tanah),
- ✓ temperatur tidak terlalu tinggi (800/ 1.1000 C),
- ✓ tidak terdapat asap sisa pembakaran yang akan mencemari lingkungan,
- ✓ tidak bising dan kemasan kompak per unit,
- ✓ tidak menimbulkan panas pada tabung pembakar,
- ✓ sisa abu dapat dimanfaatkan menjadi produksi batu bata/ bataco.



TUNGKU SANIRA

Tungku Sanira adalah tungku pembakaran sampah nir racun atau non-toxic waste furnace yang menggunakan sistem pembakaran tanpa bahan bakar minyak yang melalui proses filter asap serta sistem water spray untuk meredam asap gas CO2. Karena tak menggunakan bahan bakar minyak, tungku Sanira tidak mengeluarkan polutan yang mencemari lingkungan.



Gambar 4

Gambar Incinerator Mini & Tungku Sanira

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa Kondisi kawasan permukiman kumuh di RT 01, 04 & 05 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi didominasi oleh tingkat kepadatan tinggi dengan pembangunan secara individual serta kurangnya layanan infrastruktur yang memadai, perlunya jalan lingkungan dan jalan Muhlalla pada Rt 01/Rw 06 untuk di cor sepanjang 100m, diperlukan pula pengembangan jaringan perpipaan air bersih, menyangkut air limbah perlu dibangun IPAL komunal, adanya penanganan sampah yang lebih komperhensif, pembuatan Taman Kota dan penghijauan kali sunter di Rw 05. Sedangkan Perlunya perlibatan masyarakat dengan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan.
- [2] Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Departemen Pekerjaan Umum. *Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota*, 2006.
- [3] Kamus *Tata Ruang*. 1998. Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, 1998.
- [4] Metropolitan. Sobirin. 2001. *Distribusi Pemukiman dan Prasarana Kota: Studi Kasus Dinamika Pembangunan Kota di Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- [5] Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- [6] Endraswara, S. *Metodelogi Penelitian Kebudayaan*, 2003.
- [7] Komaruddin. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta : Yayasan REI, 1996.
- [8] Amri, Nurmaida. *Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh Tepian Sungai Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara*. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2013.
- [9] Budihardjo, Eko. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alumni, 1997